

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan literatur ini, penulis merujuk pada *literature review* yang bersumber daripada buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas topik terkait efektivitas *Amazon Fund* dalam mengatasi deforestasi di Amazon ditengah dinamika politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Bolsonaro. Kajian literatur ini digunakan oleh penulis sebagai landasan utama untuk memahami konteks sosial-politik, ekonomi, dan kelembagaan. Dengan menelaah berbagai perspektif yang telah diteliti sebelumnya, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara bantuan iklim, tata kelola hutan, dan pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat menganalisis efektivitas dari *Amazon Fund* secara lebih tepat melalui pendekatan Efektivitas program, keamanan lingkungan dan bantuan luar negeri (*Foreign Aid*). Dalam proses analisis, penulis telah mengkaji beberapa karya ilmiah sebagai referensi yang menjadi perbandingan sebagai berikut:

Literatur **pertama** berjudul **“Small North and Big South: the Ownership-Donorship Nexus in the *Amazon Fund*” (2023)**. Ditulis oleh **Johanne Dohlie Saltnes, Juliana Santiago**. Literatur ini menjelaskan mengenai *Amazon Fund* sebagai salah satu instrumen keuangan lingkungan terbesar di dunia, yang memainkan peran penting dalam mendukung upaya pengurangan deforestasi serta implementasi kebijakan pelaksanaan REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) di Brasil. Dana ini menjadi simbol konkret kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, khususnya dalam konteks perlindungan hutan tropis Amazon yang memiliki nilai ekologis strategis bagi dunia. Sejak didirikan pada tahun 2008, *Amazon Fund* sendiri telah mengumpulkan dana sebesar US\$ 1.3 miliar hingga akhir tahun 2019, dengan Norwegia sebagai donor utama yang menyumbang bagian terbesar dari total dana tersebut. Pendanaan ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek konservasi, pengawasan hutan, penguatan kapasitas institusi lingkungan dan juga

pemberdayaan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Selain itu, dalam literatur ini juga menjelaskan secara mendalam mengenai struktur tata kelola *Amazon Fund* yang unik, dan menjadi sorotan dalam diskursus hubungan donor dan penerima. Salah satu prinsip yang diusung dalam desain kelembagaan dana ini adalah penekanan pada kedaulatan nasional Brasil.

Amazon Fund sengaja dirancang agar membatasi campur tangan langsung dari pihak donor dalam pengambilan keputusan, guna memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang diimplementasikan tetap berada dalam kendali otoritas nasional Brasil. Hal ini tercermin dari status Norwegia sebagai donor utama yang hanya memiliki posisi sebagai pengamat dalam komite pengelola (*Governing Board*). Meskipun memiliki peran penting dalam pendanaan, Norwegia tidak diberikan hak suara atau kewenangan langsung dalam menentukan arah kebijakan dan penggunaan dana. Model ini menjadi contoh konkret bagaimana kerjasama internasional dapat diatur dengan prinsip saling menghormati kedaulatan dan kepemimpinan lokal atas kebijakan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, literatur ini juga menyoroti bagaimana dinamika politik domestik Brasil yang turut mempengaruhi keberlanjutan kerjasama internasional ini dalam kerangka *Amazon Fund*. Pada tahun 2019, terjadi pembekuan aktivitas *Amazon Fund* sebagai akibat adanya keputusan sepihak dari Presiden Brasil yang mengubah struktur tata kelola dana tanpa melakukan konsultasi dengan para donor, termasuk Norwegia.

Perubahan ini dinilai melanggar kesepakatan awal, sehingga mendorong Norwegia untuk menghentikan sementara kontribusinya terhadap *Amazon Fund*. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kebijakan internal suatu negara dapat memiliki implikasi signifikan terhadap kepercayaan dan komitmen internasional, bahkan dalam konteks kerjasama yang bersifat global seperti perubahan iklim dan pelestarian hutan. Namun, literatur ini juga menunjukkan adanya perkembangan positif dalam hubungan Norwegia dan Brasil, khususnya dengan adanya rencana pembukaan kembali *Amazon Fund* pada tahun 2023. Upaya ini menjadi penanda penting bahwa masih terdapat keinginan dan komitmen dari kedua belah pihak untuk kerjasama yang sempat renggang. Selain itu juga, minat baru dari negara-negara donor lain untuk turut berkontribusi ke dalam *Amazon Fund* semakin

menguat, menjadikan dana ini kembali dipandang sebagai platform strategis dalam kerjasama global untuk perlinfungan hutan dan pengurangan emisi karbon (Saltnes & Santiago, 2023).

Literatur kedua berjudul **“Shaping REDD+: Interaction Between Bilateral and Multilateral Rulemaking” (2021)**. Ditulis oleh **Maria Eugenia Recio**. Penelitian ini membahas bagaimana kerjasama bilateral berperan dalam upaya pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, terutama melalui inisiatif yang dipimpin oleh Norwegia. Penelitian ini juga berpendapat bahwa aturan dalam bilateral memiliki pengaruh besar terhadap regulasi REDD+ secara lebih luas di bawah UNFCCC. Literatur ini juga menjelaskan bagaimana aturan bilateral dan multilateral saling mempengaruhi, terutama dalam hal pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) aktivitas REDD+ dan juga menekankan betapa pentingnya hutan dalam menjaga keseimbangan ekologi, mendukung kehidupan manusia, dan menghadapi perubahan iklim. Hutan berperan besar dalam menyediakan udara bersih, air dan menjaga keanekaragaman hayati. Namun, karena adanya deforetasi secara terus menerus menyebabkan hutan menghilang dalam 100-200 tahun lagi, jika tidak segera ditangani secepatnya. Selama beberapa dekade ini, komunitas internasional telah berupaya membentuk perjanjian yang efektif untuk melindungi hutan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui REDD+, yang dikembangkan oleh UNFCCC sebagai mekanisme untuk memberi inisiatif pada konservasi hutan dan menkan laju deforestasi, khususnya di negara berkembang. REDD+ telah menghasilkan beberapa skema pendanaan multilateral, seperti fasilitas kemitraan dan dana iklim hijau, yang bertujuan untuk mendukung implementasi REDD+ secara lebih luas.

Penelitian ini juga mengangkat konsep hukum dari William Twining, yang menjelaskan mengenai sistem hukum suatu negara bisa mempengaruhi sistem hukum lainnya. Dalam konteks REDD+, difusi hukum terjadi ketika aturan dalam perjanjian bilateral terutama yang dibuat oleh Norwegia mempengaruhi kebijakan dalam UNFCCC. Proses ini tidak terjadi satu arah saja, tetepai melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai kerangka hukum, sehingga dapat membentuk regulasi global REDD+. Selain itu, penelitian ini membahas masuknya REDD+

dalam UNFCCC dan tantangannya. Awalnya, UNFCCC kurang memperhatikan perlindungan hutan dalam kebijakan perubahan iklim. Fokus utama protokol kyoto saat itu lebih ke penghijauan dan reboisasi. Namun, pada 2005, Papua Nugini dan Kosta Rika mengusulkan mekanisme inisiatif untuk negara-negara berkembang yang berhasil mengurangi deforestasi. Pada tahun 2007, REDD+ resmi masuk dalam rencana aksi Bali, yang kemudian mendorong pengembangan mekanisme pembiayaan berbasis hasil dalam negoisasi multilateral.

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga membahas pengaruh kerjasama bilateral terhadap regulasi multilateral. Bantuan bilateral, terutama dari Norwegia, mengalokasikan dana miliaran dolar untuk kemitraan REDD+ dengan negara berkembang. Perjanjian bilateral ini tidak hanya mendukung pendanaan tetapi juga menetapkan standar dalam struktur keuangan dan mekanisme verifikasi REDD+, yang kemudian banyak diadopsi dalam skala internasional. Selain itu, penelitian ini membahas pendekatan berbasis hasil yang menjadi prinsip utama dalam pembiayaan REDD+, dengan mekanisme yang memastikan dana hanya dicairkan setelah adanya pencapaian pengurangan emisi diverifikasi secara independen. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh praktik Brasil, menyeimbangkan kebutuhan negara penerima akan fleksibilitas dengan kepentingan donor untuk memastikan efektifitas investasi. Penelitian ini juga memberikan contoh konkret dalam penerapan pendekatan ini, yaitu *Amazon Fund*, hasil kerja sama Norwegia-Brasil, yang menjadi referensi utama dalam skema REDD+.

Agar sistem berbasis hasil berjalan efektif, mekanisme pemantauan, laporan, dan verifikasi (MRV) memainkan peran penting dalam mengukur serta menilai keberhasilan REDD+. MRV memungkinkan akuntabilitas dalam pendanaan berbasis hasil, memastikan bahwa klaim pengurangan emisi benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan. Meskipun sebelumnya terdapat perbedaan pandangan antara Norwegia dan Brasil mengenai independensi verifikasi, namun pada akhirnya kompromi dicapai dalam kerangka UNFCCC, yang mempertahankan kedaulatan negara sekaligus menjamin transparansi melalui penelitian teknis. Dengan ini, penguatan MRV dalam REDD+ tidak hanya meningkatkan kredibilitas skema ini tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan berbasis hasil benar-benar

berkontribusi pada upaya global dalam menanggulangi deforestasi dan perubahan iklim. Penelitian ini mendukung penelitian ini mengenai bantuan Norwegia dalam mengatasi deforestasi di Amazon dengan memberikan wawasan penulis tentang bagaimana mekanisme REDD+ bekerja serta tantangan dalam implementasi dan transparansinya.

Perbedaan jurnal dan penelitian ini adalah jurnal ini membahas interaksi antara perjanjian bilateral dan multilateral dalam REDD+ sedangkan penelitian ini fokus pada kerja sama Norwegia dan Brasil saja dalam mengurangi deforestasi di Amazon (Recio, 2022).

Literatur **ketiga** berjudul **Achieving Brazil's Deforestation Target Will Reduce Fire and Deliver Air Quality and Public Health Benefit (2022)**. Ditulis oleh **Edward W. Butt, Luke Conibear, Callum Smith, Jessica C. A. Baker, Richard Rigby, Christoph Knote, and Dominick V. Spacklen**. Jurnal ini membahas keterkaitan antara deforestasi di Brasil, terutama di kawasan Amazon, dengan dampaknya terhadap kualitas udara serta Kesehatan masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana perubahan penggunaan lahan dan pengurangan tutupan hutan berkontribusi terhadap peningkatan intensitas kebakaran hutan, yang pada akhirnya memperburuk polusi udara dan membahayakan kesejahteraan penduduk di kawasan terdampak. Salah satu aspek utama yang dianalisis adalah tren historis deforestasi sejak dekade 1970-an hingga 2010, di mana sekitar 15% dari keseluruhan luas hutan Amazon telah mengalami penggundulan. Data menunjukkan penurunan signifikan dalam laju deforestasi, dari puncaknya pada tahun 2004 sebesar 27.772 km² per tahun menjadi hanya 4.571 km² per tahun pada tahun 2012, yang merepresentasikan penurunan sekitar 85%. Namun, tren ini tidak bertahan lama. Sejak tahun 2012, laju deforestasi kembali mengalami peningkatan, mencapai 10.129 km² pada tahun 2019 dan 10.851 km² pada tahun 2020 angka yang jauh dari target pengurangan deforestasi yang direncanakan oleh pemerintah Brasil. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti bagaimana peningkatan deforestasi berkorelasi dengan tingginya kejadian kebakaran hutan yang menghasilkan emisi partikel halus, khususnya PM 2.5 (*particulate matter*), yang dikenal sebagai salah satu polutan berbahaya bagi kesehatan. Konsentrasi PM 2.5 yang tinggi dapat memicu

gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan berbagai masalah kesehatan lainnya, terutama di kalangan anak-anak dan kelompok rentan. Dengan demikian, deforestasi tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga krisis kesehatan masyarakat yang mendesak.

Jurnal ini juga mengidentifikasi faktor sosial dan ekonomi, seperti ekspansi pertanian, kebutuhan lahan, dan tekanan ekonomi lokal, sebagai pendorong utama deforestasi. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa kebijakan konservasi harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah, jurnal ini lebih menyoroti akibat dari deforestasi di Amazon sedangkan penelitian ini lebih ke kerjasama untuk mengatasi deforestasi di Amazon. Sedangkan persamaannya adalah membahas bagaimana pentingnya hutan Amazon dan jurnal ini membantu memperkuat argument penelitian ini bahwa deforestasi yang terjadi di Amazon penting untuk diteliti karena memiliki dampak yang besar (Butt et al., 2022).

Artikel **keempat** berjudul **“REDD+ and Forest Protection on Indigenous Lands in the Amazon (2020)”** ditulis oleh **Beatriz Gracia, Lawrence Rimmer, Leticia Canal Viera, dan Brendan**. Penelitian ini menjelaskan mengenai REDD+ yang telah berkembang untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan juga mempromosikan konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Skema pembayaran berbasis hasil kinerja merupakan elemen utama REDD+, di mana kompensasi finansial diberikan berdasarkan pencapaian hasil yang berkaitan dengan implementasi program tersebut. Penelitian ini menekankan peran signifikan yang dilakukan Brasil, mengingat 60% dari hutan Amazon berada di wilayah Brasil, yang berpotensi memperoleh manfaat besar dari program REDD+, terutama karena wilayah adat di kawasan tersebut memiliki peran krusial dalam penyimpanan karbon serta pelestarian hutan. Wilayah ini menyimpan sekitar 27,1% karbon di atas permukaan tanah Amazon pada sekitar 30% wilayah daratan.

Penelitian ini juga membahas pentingnya melindungi masyarakat adat atas tanah tradisional mereka. Hak-hak ini tidak dapat digantikan oleh kebijakan lain, termasuk penetapan kawasan konservasi. Dalam penelitian ini, pendekatan hukum

juga dinilai penting untuk memastikan implementasi program REDD+ tidak merugikan masyarakat adat atau melanggar hak mereka. Proyek REDD+ yang membatasi akses masyarakat adat ke tanah mereka atau tidak menghormati hak-hak tersebut dianggap bertentangan dengan hukum, bahkan konstitusi negara. Selain itu, penelitian ini membahas tantangan social-ekonomi yang dihadapi dalam pelaksanaan REDD+ seperti pemotongan anggaran untuk badan lingkungan hidup dan rancangan undang-undang yang dilaporkan lebih memihak agribisnis dan juga adanya konflik internal yang muncul akibat ketidakmerataan distribusi manfaat dalam proyek surui. Isu-isu seperti ini menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat adat, yang penting untuk keberhasilan program REDD+. Di sisi lain, penelitian ini melihat REDD+ sebagai program yang berpeluang menciptakan mekanisme pasar karbon yang efisien, terutama dalam pasar karbon sukarela. Jika Brasil dapat memperkuat pasar karbon domestiknya, proyek REDD+ berpotensi menarik lebih banyak dukungan finansial dan investasi untuk perlindungan hutan Amazon. Keberhasilan ini akan membantu Brasil dalam mengurangi deforestasi, menjaga kelestarian hutan, dan juga memberikan manfaat jangka Panjang.

Penelitian ini secara kritis mengevaluasi kelayakan REDD+ di tanah adat Brasil dengan menganalisis tiga aspek utama, yaitu persyaratan hukum, teknis, dan pasar. Saat ini, regulasi di Brasil belum secara spesifik mengatur proyek REDD+ dalam pasar karbon sukarela, tetapi juga tidak menghambat pelaksanaannya. Meskipun kerangka hukum yang ada memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat serta hak mereka atas tanah tradisional, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, termasuk tingkat keterlibatan masyarakat yang belum merata. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan penulis mengenai hubungan antara REDD+ dan hak-hak masyarakat adat di Amazon, Brasil. Dengan menyoroti aspek hukum, sosial dan ekonomi. Penelitian ini juga menjadi referensi penulis yang akan membahas studi mengenai kebijakan konservasi dan perlindungan hutan. Perbedaannya adalah jurnal ini membahas keterkaitan REDD+ dengan perlindungan hutan di wilayah adat dengan menyoroti aspek hukum (Garcia et al., 2021).

Artikel kelima yang berjudul **Sustainable Production Systems in the Brazilian Amazon: A Systematic Review (2025)**. Yang ditulis oleh **Matheus de Miranda Ribeiro Borges, Liliane Marques de Sousa and Giovana Ghisleni Ribas**. Literatur ini menjelaskan bahwa sistem produksi berkelanjutan di wilayah Amazon Brasil telah menjadi sorotan utama dalam berbagai kajian akademik dan kebijakan internasional, khususnya setelah peluncuran agenda pembangunan berkelanjutan 2030 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam konteks ini, terjadi peningkatan perhatian terhadap penerapan model produksi ramah lingkungan seperti sistem agroforestri, pengelolaan hutan lestari, dan integrasi antara sektor pertanian, peternakan, serta kehutanan, yang mengalami lonjakan perkembangan signifikan sejak tahun 2015. Pendekatan-pendekatan ini dipandang mampu menawarkan solusi yang menyelaraskan kebutuhan ekologis dan ekonomi di kawasan yang secara ekologis krusial, seperti Amazon.

Literatur ini juga menyoroti adanya ketimpangan dalam pengembangan dan perhatian terhadap pendekatan alternatif lainnya, seperti pertanian organik yang masih belum banyak dibahas. Keterbatasan ini disebabkan oleh hambatan aksesibilitas yang rendah, terutama di wilayah-wilayah pedalaman Amazon yang sulit dijangkau. Dua wilayah yang menjadi pusat utama pengembangan sistem-sistem berkelanjutan ini adalah Para dan Moto Grosso, namun dalam literatur ini mencatat adanya ketimpangan dalam distribusi, di mana daerah-daerah dengan tingkat deforestasi yang tinggi justru kurang dipedulikan. Hal ini menunjukkan perlunya perluasan cakupan penelitian, agar wilayah yang menghadapi tekanan lebih besar dapat perhatian yang lebih besar, sehingga intervensi yang dirancang menjadi lebih tepat dan inklusif.

Literatur ini juga menjelaskan dampak dari implementasi sistem agroforestri dan integratif dari sisi ekologi, sistem ini mampu meningkatkan keanekaragaman hayati, memperbaiki cadangan karbon tanah, serta mendukung konservasi hutan tropis. Sementara itu, secara sosial dan ekonomi, sistem ini memberikan keuntungan nyata bagi petani kecil maupun pelaku usaha berskala besar dalam bentuk peningkatan pendapatan, diversifikasi hasil produksi, dan peningkatan ketahanan ekonomi lokal. Namun demikian, implementasi sistem produksi

berkelanjutan di Amazon masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Tingginya biaya awal, keterbatasan infrastruktur dan tenaga kerja terlatih, serta kompleksitas kebijakan dan regulasi menjadi hambatan utama. Tidak hanya itu, resistensi budaya dari sebagian masyarakat lokal terhadap perubahan sistem pertanian tradisional, serta konflik kepentingan antara upaya konservasi dan ekspansi pertanian, turut menjadi kendala sosial yang kompleks.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, literatur ini juga menyoroti adanya peluang strategis dalam mendukung keberhasilan sistem produksi berkelanjutan di tengah berbagai tantangan yang ada. Diversifikasi produk dinilai dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan komunitas lokal terhadap perubahan iklim dan fluktuasi pasar global. Sistem agroforestri dan silvopastoral pun memiliki potensi signifikan dalam penyerapan karbon, menjadikannya elemen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Keberhasilan implementasi sistem tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah, yang terbukti efektif mendorong perubahan dari tingkat akar rumput. Selain itu, literatur ini merekomendasikan reformasi kelembagaan untuk memperluas penerapan praktik berkelanjutan, seperti desentralisasi pengelolaan sumber daya alam, penyediaan insentif ekonomi, edukasi bagi masyarakat, serta peningkatan partisipasi komunitas dalam perumusan kebijakan. Penelitian berbasis wilayah spesifik juga dianggap penting untuk memastikan solusi yang dihasilkan relevan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik setempat (Borges et al., 2025).

Artikel keenam berjudul **Evidence that a national REDD+ program reduces tree cover loss and carbon emissions in a high forest cover, low deforestation country (2019)**. Yang ditulis oleh **Anand Roopsinda, Brent Sohngen dan Jodi Brandt**. Menjelaskan tentang Program REDD+ yang dijalankan secara bilateral antara Norwegia dan Guyana pada periode 2010–2015 menjadi salah satu studi penting dalam mengevaluasi efektifitas upaya pengurangan deforestasi di negara dengan tutupan hutan tinggi namun tingkat deforestasi yang relatif *rendah (High Forest Low Deforestation/HFLD)*. Literatur ini menunjukkan bahwa insentif berbasis hasil (*results-based payment*) dapat berkontribusi nyata dalam menekan

kehilangan tutupan pohon dan emisi karbon, bahkan di negara yang belum mengalami tekanan deforestasi besar-besaran. Dengan menggunakan metode *synthetic control*, penelitian ini berhasil membangun sebuah skenario alternatif yang menggambarkan tren deforestasi Guyana jika program REDD+ tidak dilaksanakan. Melalui perbandingan tersebut, ditemukan bahwa selama masa pelaksanaan program, Guyana mengalami penurunan deforestasi sebesar 35% dibandingkan skenario tanpa intervensi, serta berhasil menghindari emisi sebesar 12,8 juta ton CO₂. Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan evaluasi yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kerangka *Theory of Change (ToC)* yang dimodifikasi, yang menghubungkan kegiatan program seperti peningkatan kapasitas dan tata kelola dengan hasil lingkungan yang diharapkan. Studi ini juga memperkuat pentingnya kehadiran insentif berkelanjutan sebagai penopang utama dalam menjaga hasil konservasi. Ketika dukungan Norwegia berhenti pada akhir program, tren kehilangan tutupan pohon justru meningkat, melebihi batas yang sebelumnya ditetapkan sebagai ambang pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program REDD+ tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan pembiayaan dan komitmen jangka panjang.

Selain itu, penelitian ini menyoroti tantangan yang masih melekat dalam skema REDD+, terutama terkait kebocoran (*leakage*) dan permanensi hasil. Meski kebocoran lintas wilayah perbatasan terdeteksi dalam skala terbatas, keberadaannya menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas konservasi jika tidak diiringi oleh kerjasama regional yang kuat. Sementara itu, aspek permanensi menjadi tantangan krusial, mengingat banyak hasil yang dicapai selama program tidak dapat dipertahankan setelah dukungan dihentikan. Oleh karena itu, studi ini menyarankan perlunya mekanisme jangka panjang yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga melibatkan perbaikan tata kelola, pengawasan, dan kolaborasi antarnegara. Melalui pendekatan metodologis yang kuat dan data yang transparan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur REDD+, terutama dalam konteks negara-negara HFLD yang selama ini cenderung kurang diperhatikan. Kasus Guyana menunjukkan bahwa insentif internasional dapat menjadi pemicu perubahan positif, tetapi hasil tersebut tidak akan bersifat tahan lama tanpa

komitmen keberlanjutan yang melekat pada struktur kebijakan nasional dan hubungan internasional yang mendasarinya. Dalam konteks yang lebih luas, studi ini menggarisbawahi bahwa REDD+ bukan hanya soal pengurangan emisi, tetapi juga menyangkut tata kelola, keadilan iklim, dan dinamika politik antara negara donor dan penerima (Roopsind et al., 2019).

Literatur **ketujuh** berjudul **Two Global Challenges, One Solution: International Cooperation to Combat Climate Change and Tropical Deforestation (2024)**. Yang ditulis oleh **Antonio G.M La Vina dan Alaya de Leon**. Literatur ini menjelaskan mengenai kebijakan perubahan iklim internasional, perlindungan hutan tropis yang telah menjadi salah satu fokus strategis mengingat kontribusi signifikan sektor kehutanan terhadap emisi gas rumah kaca global dan mengulas evolusi mekanisme REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), termasuk tantangan dan peluang implementasinya dalam konteks kerja sama internasional. literatur ini menegaskan bahwa deforestasi dan degradasi hutan merupakan kontributor utama terhadap emisi karbon, sebagaimana ditegaskan dalam laporan *Stern Review* dan IPCC. Oleh karena itu, pencegahan deforestasi di negara-negara berkembang menjadi strategi prioritas dalam upaya mitigasi iklim global. Namun, keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada desain kebijakan teknis, tetapi juga pada kepastian hak atas tanah, tata kelola hutan, dan dukungan internasional baik dalam bentuk pendanaan maupun kapasitas kelembagaan.

Salah satu momen penting dalam pembentukan kerangka REDD+ adalah pertemuan di Bali tahun 2007 yang secara resmi memperkenalkan REDD sebagai bagian dari agenda negosiasi iklim global. Kerangka ini kemudian berkembang di berbagai *Conference of the Parties* (COP) selanjutnya, termasuk COP 16 di Cancun yang menetapkan REDD+ sebagai mekanisme resmi di bawah UNFCCC. REDD+ tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan hutan, manfaat sosial, dan pengakuan hak masyarakat adat. Jurnal ini juga menyajikan analisis mendalam tentang kompleksitas politik dalam negosiasi REDD+. Perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang, terutama terkait tanggung jawab pendanaan dan

kedaulatan pengelolaan sumber daya, menjadi tantangan yang terus muncul dalam forum internasional. Di samping itu, aspek teknis seperti pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta penetapan *baseline* emisi (*reference levels*), menjadi isu-isu krusial yang kerap diperdebatkan.

Dalam hal pendanaan, REDD+ mendorong pendekatan berbasis hasil (*results-based payment*), baik melalui mekanisme pasar maupun non-pasar. Namun, seperti yang digarisbawahi dalam literatur ini adalah ketidakpastian komitmen pendanaan dari negara donor serta kekhawatiran terhadap dampak sosial dan lingkungan menjadi penghambat utama dalam skala implementasinya. Oleh karena itu, sistem pengamanan sosial dan lingkungan (*safeguards*) yang kuat dan akuntabel menjadi syarat mutlak dalam setiap proyek REDD+. Literatur ini juga menempatkan REDD+ dalam konteks sejarah panjang upaya konservasi hutan tropis, mulai dari *Tropical Forestry Action Plan* (TFAP) hingga inisiatif yang lebih modern seperti *Forest Law Enforcement and Governance* (FLEG) dan FLEGT oleh Uni Eropa. Pembelajaran dari inisiatif-inisiatif terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu teknokratis dan tidak melibatkan aktor lokal sering kali gagal mencapai dampak jangka panjang. Selain itu, literatur ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan REDD+. Program-program seperti UN-REDD, *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF), dan *Forest Investment Program* (FIP) menjadi contoh bagaimana sinergi antara negara, lembaga multilateral, masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat mendukung keberhasilan REDD+.

Literatur ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan REDD+ sangat bergantung pada keberlanjutan pendanaan, penerapan *safeguard* yang konsisten, adaptasi terhadap perkembangan teknologi pemantauan hutan, serta integrasi REDD+ ke dalam strategi pengelolaan sektor lahan secara menyeluruh. REDD+ harus tetap menjunjung prinsip keadilan sosial dan hak masyarakat lokal sebagai bagian dari strategi global untuk keadilan iklim. Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang hubungan antara kebijakan internasional, konservasi hutan, dan perubahan iklim. REDD+ ditampilkan bukan hanya sebagai mekanisme teknis untuk mengurangi emisi, tetapi juga sebagai arena politik

transnasional yang mencerminkan ketegangan, harapan, dan potensi transformasi dalam tata kelola lingkungan global (La Viña Dean et al., 2014).

Literatur kedelapan berjudul **“Annual Review of Environment and Resources The Many Faces of Environmental Security (2025)**. Ditulis oleh **Jan Selby, Gabrielle Daoust, Anwasha Dutta, Jonathan Kishen Gamu, Esther Marijnen, Ayesha Siddiqi,⁶ and Mark Zeitoun**. Literatur ini menekankan bahwa permasalahan lingkungan tidak hanya terbatas pada isu perubahan iklim dan deforestasi, tetapi mencakup lima bidang utama yang saling terkait, yaitu perubahan iklim, pengelolaan air, hutan dan deforestasi, keanekaragaman hayati dan konservasi, serta pencemaran akibat aktivitas pertambangan dan industri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan lingkungan adalah konsep yang bersifat multidimensional dan lintas sektor, sehingga tidak dapat direduksi hanya pada satu aspek tertentu saja. Salah satu kritik utama yang diangkat dalam literatur ini adalah kecenderungan dominasi narasi tentang keamanan iklim dalam wacana global. Meskipun perubahan iklim memang merupakan ancaman besar yang berdampak luas, fokus yang terlalu besar pada isu ini berisiko mengaburkan kompleksitas masalah lingkungan lainnya. Sebagai contoh, konflik terkait pengelolaan air atau hilangnya tutupan hutan sering kali dianalisis hanya sebagai akibat dari perubahan iklim, padahal keduanya juga memiliki akar penyebab dan konsekuensi yang spesifik dan independen. Akibatnya, pendekatan analisis terhadap isu-isu tersebut menjadi sempit dan kurang menyeluruh.

Literatur ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi pendekatan metodologis dan teoritis dalam mengkaji keamanan lingkungan. Tidak cukup hanya mengandalkan model-model kuantitatif atau studi berbasis data global, pendekatan kualitatif, studi kasus kontekstual, serta analisis interdisipliner sangat diperlukan untuk mengungkap hubungan kompleks antara degradasi lingkungan, kerentanan sosial, dan potensi konflik. Selain itu, literatur ini menyerukan adanya peningkatan diskusi lintas isu dalam penelitian keamanan lingkungan. Wawasan dari studi tentang kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, dan dampak industri ekstraktif dapat memperkaya perspektif dalam memahami keamanan iklim. Sebaliknya, pendekatan yang digunakan dalam studi iklim juga dapat memberikan

kontribusi penting untuk mengkaji masalah lingkungan lain secara lebih terstruktur. Hal ini diharapkan mampu mengatasi isolasi antara topik-topik lingkungan dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif (Selby et al., 2025).

Literatur kesembilan berjudul **The Brazil-Norway Agreement with Performance-Based Payments for Forest Conservation: Successes, Challenges, and Lessons (2025)**. Ditulis oleh **Nancy Birdsall, William Savedoff and Frances Seymour**. Artikel ini memberikan tinjauan kritis terhadap efektifitas mekanisme pembayaran berbasis kinerja dalam skema REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Artikel ini menggarisbawahi urgensi untuk mereformasi sistem insentif agar lebih responsif terhadap kebutuhan para aktor pelaksana di lapangan, termasuk pemerintah daerah, pemilik lahan individu, dan pengelola proyek konservasi. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa distribusi pendanaan tidak hanya mengandalkan jumlah dana yang tersedia, melainkan juga didasarkan pada pencapaian nyata dalam pengurangan tingkat deforestasi dan juga menyoroti perjanjian bilateral antara Brasil dan Norwegia yang dimulai pada tahun 2008 sebagai studi kasus utama. Dalam kerangka kerja sama tersebut, Norwegia berkomitmen untuk menyalurkan dana ke *Amazon Fund* sebagai bentuk kompensasi atas keberhasilan Brasil dalam menurunkan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi, dengan mengacu pada perbandingan terhadap tingkat emisi pada periode sebelumnya. Kebijakan ini memberikan insentif positif bagi Brasil untuk memperkuat regulasi lingkungannya dan memperluas langkah-langkah konservasi berbasis hasil (*results-based payment*).

selain itu, artikel ini juga menyoroti sejumlah tantangan struktural dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya adalah ketidakseimbangan antara keberhasilan Brasil dalam menurunkan laju deforestasi yang sangat cepat dan proses pencairan dana dari pihak donor yang relatif lambat. Ketidaksesuaian ini berisiko menimbulkan ketegangan dalam pengelolaan anggaran dan memengaruhi keberlanjutan program di tingkat lokal. Selain itu, artikel ini juga mencatat adanya kurangnya pemahaman menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan terhadap ketentuan perjanjian, yang memicu kekhawatiran mengenai arah dan strategi jangka

panjang dari sistem pendanaan tersebut. Keduanya memiliki titik temu dalam mengkaji kerjasama bilateral antara Brasil dan Norwegia, serta peran sentral REDD+ dalam mendorong konservasi hutan tropis. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya diskusi mengenai efektivitas dan keberlanjutan kebijakan insentif lingkungan, serta memperkuat argumen bahwa kesuksesan program konservasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada desain kelembagaan yang adaptif, transparan, dan didukung oleh partisipasi aktif para pemangku kepentingan. (Birdsall et al., 2025).

Literatur **kesepuluh** berjudul **Analysis of Motive and Effectiveness of Norway Foreign Aid Through REDD+ Scheme on Peat Forest Restoration in Indonesia (2023)**. Jurnal ini ditulis oleh **Lucitania Rezky dan Ghofur Cucucaniago**. Jurnal ini membahas alasan di balik bantuan luar negeri Norwegia dan seberapa efektif bantuan tersebut dalam upaya pemulihan hutan gambut di Indonesia melalui skema REDD+. Dengan luas mencapai 22,5 juta hektar, hutan gambut Indonesia memiliki kemampuan besar dalam menyerap karbon dioksida. Penelitian ini lebih menyoroti bahwa bantuan Norwegia belum mencapai target yang diharapkan. Hingga saat ini, pengurangan emisi karbon sebesar 41% yang seharusnya tercapai sejak perjanjian REDD+ tahun 2009 masih belum terealisasi. Selanjutnya, penelitian ini membahas komitmen Indonesia terhadap REDD+ dan kebijakan lingkungan. Indonesia sendiri berkomitmen dalam mengurangi emisi dengan ikut serta dalam program REDD+, yang fokusnya mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Pembentukan Aliansi Iklim Hutan Indonesia (IFCA) menjadi bukti nyata bahwa Indonesia berusaha menyesuaikan diri dengan standar REDD+. Selain itu, berbagai regulasi penting, seperti UU No.23 Tahun 2009 dan beberapa peraturan Menteri juga mendukung langkah Indonesia dalam memenuhi komitmen lingkungan internasional. Namun, dalam implementasinya eksploitasi hutan tetap ada dan membuat deforestasi tetap terjadi. Hal ini mendorong pentingnya bantuan dari komunitas internasional.

Penelitian ini juga membahas kontribusi Norwegia dalam program REDD+ dengan bantuan finansial yang cukup besar, mencapai 1 USD miliar melalui NICFI. Bantuan ini dibagi dalam beberapa tahapan, mulai dari persiapan hingga

implementasi penuh, dengan harapan dapat mengurangi emisi karbon sesuai dengan tujuan utama dan juga membangun sistem tata kelola yang selaras dengan mekanisme bantuan internasional. Untuk meningkatkan efektifitas REDD+ di Indonesia, Norwegia menggunakan berbagai pendekatan pendanaan, termasuk kerja sama bilateral, dukungan kepada organisasi masyarakat sipil, dan bantuan melalui jalur multilateral. Selain itu, jurnal ini juga mengidentifikasi bahwa kepemilikan kebijakan dan penyelarasan lokal menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas bantuan internasional. Kompleksitas kebijakan lingkungan Indonesia, ditambah dengan masalah tata kelola yang belum maksimal, membuat bantuan yang diberikan Norwegia sulit untuk dimanfaatkan secara optimal. Ketidakkonsistenan dalam komitmen lingkungan dan adanya kebijakan yang bertentangan melemahkan upaya pengendalian emisi. Perbedaan jurnal dengan penelitian ini adalah jurnal ini berfokus pada implementasi REDD+ di Indonesia dalam pemulihan hutan gambut sedangkan penelitian ini berfokus di Brasil dalam mengatasi deforestasi Amazon. Persamaannya adalah sama-sama membahas efektifitas bantuan luar negeri dalam program REDD+ (Rizky & Cucucaniago, 2023).